DAMPAK KETIDAK PASTIAN POLITIK (Kuliah V)

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi jalannya perekonomian nasional, baik itu berawal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Konflik antara negera berkembang dengan negara maju terkait proteksi pertanian, konflik dagang dua raksasa ekonomi dunia : Amerika dan china yang bisa mengancam perkembangan ekonomi di Indonesia.Mulai tahun 2004 Indonesia menghentikan kontrak pinjamannya dengan IMF, yang menimbulkan konsekuensi tidak ada lagi kucuran pinjaman dari IMF.

Perubahan-perubahan politik yang sering terjadi di Indonesia apakah akan mengakibatkan perubahan fundamental dalam strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dengan kaca mata ceteris paribus, apabila politik dalam keadaan stabil maka perekonomian Indonesia akan bersajalan as usual. Berbagai indikator yang menunjukkan adanya stabilitas dan kondisi untuk memelihara apa yang sudah ada seperti tahun-tahun sebelumnya. Contoh –contoh indikator tersebut misalnya pertumbuhan ekonomi tumbuh 4%, inflasi diperkirakan di bawah 5 persen, tingkat suku bunga menurun, SBI juga dibawah 10%, kurs rupiah stabil, dan masuk kategori yang menguat di Asia.

Sampai dengan tahun 2004 maka sepertinya sangat sulit untuk berharap akan terjadinya perubahan berupa perbaikan yang signifikan dan spektauler pada perekonomian Indonesia. Perubahan hanya bersifat alamiah, kemjuan hanya bersifat incremental sebagai trend dari perbaikan eknomi yang terjadi sejak tahun 1999. Ini jauh dari ekspektasi masyarakan yang sudah menunggu lebih dari lima tahun untuk suatu pemulihan ekonomi dan berharap adanya perubahan besar dalam perekonomian Indonesia.

Untuk dapat memecahkan problematika ekonomi Indonesia, saat ini diperlukan beberapa masalah misalnya pengentasan puluhan juta penduduk miskin, memberikan kesepatan kerja penuh pada 40 juta angkatan kerja, memacu peningkatan ekspor nasional, memperbaiki berbagai infrastruktur dan melindungi ekonomi rakyat dari persaingan yang tidak fair.

Sebenarnya secara politik sudah ada perubahan yang cukup mendasar di Indonesia, misalnya dalam praktek demokrasi , namun demikian belum ada tanda-tanda yang menjanjikan bahwa peristiwa perubahan politik tersebut juga diikuti dengan titik balik yang mengarah pada perubahak kebijakan dan perbaikan spektakuler bagi perekonnomian Indoneisa yang dihinggapi penyakit ekonomi biaya tinggi.

Memang tidak dipungkiri bawah situasi politik dan kebijakannya akan akan mempengaruhi perekonomian, namun peristiwa politik tersebut tampaknya belum menampilkan program yang jelas dalam bidang ekonomi, dan terutama program-program yang jelas untuk memberantas KKN yang telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Belum ada komitmen dalam membasimi KKN dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya seperti yang terjadi di negara RRC.

Sampai saat ini gema yang muncul dari aktor dan petinggi partai politik di tanah air adalah bagaimana memenangkan pemilu, bagaimana menjadi presiden, bagaimana koalisi efektif partai, dan bukan bagaimana membangkitakn dan memulihkan ekonomi Indonesia yang masih belum sepenuhnya lepas dari keterpurukan ekonomi. Belum ada yang mensosialisasikan paket program ekonomi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih secara kongkret. Kesibukan untuk memenangkan pemilu tidak dibarengi dengan program kongkret apa yang harus dilakukan setelah memenangkan pemilu tersebut.

Buruknya berbagai indikator sosial-ekonomi Indonesia seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya saing Pertumbuhan yang rendah, utang luar negeri yang tinggi, dan korupsi

yang masuk jajaran tertinggi di dunia, infrastruktur yang buruk, kemiskinan dan pengangguran yang meluas, menggambarkan ramalan skeptis bahwa ekonomi belum akan membaik secara signifikan.

Berbagai media telah memberitakan bahwa dari 12 negara di Asia Australia yang disurvai Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat terburuk dalam hal infrastrukturnya, seperti jalan raya, tenaga listrik, air bersih, dan telekonmunikasi. Padahal infrastruktur yang baik akan sangat mendukung jalannya perekonomian. Kegagalan juga bisa diakibatkan oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia, marka up dan penyimbakan lainnya dalam proses pembangunan dan jalannya perekonomian. Keadaan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa lalu sebenarnya banyak didukung oleh sektor modern, yang diakibatkan adanya investasi asing dan domestik yang tinggi. Namun dengan sering memanasnya kondisi politik di Indonesia, dapat mengakibatkan para investor akan sangat berhati-hati dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih didorong oleh konsumsi dan investasi ekonomi rakyat yang secara faktual terus berlanjut di berbagai situasi perekonomian.

Ekonomi Rakyat

Sejak kemerosotan ekonomi yan terjadi tahun 1998, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar hampir 14 persen, keprihatinan besar setiap tahun selalu terjadi atas angka-angka pertumbuhan ekonoi yang relatif kecil. Indonesia seakan terjebak paradigma lama yang menggunakan indikator pertumbuhan ekonnomi sebagai ukuran utama pembangunan masyarakat . Sebenarnya untuk melihat keberhasilan pembangunan eknonomi harus dilihat banyak indikator sosial ekonominya , pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu saja dari banyak indikator tersebut.

Menurut Dudley Seer, dalam artikelnya “The Meaning of development, ia menolak pembangunan hanya diarktikan secara sempit dengan berdasarkan ukuran kuantitatif tertentu. Di dalam pembangunan tidak bisa diabaikan adanya pertimbangan nilai, dan pembangunan merupakan suatu konsep normatif. Tulisan yang kemudian terus dikembangkan tersebut menilai pembangunan antara lain dari sejauh mana angka-angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan semakin berkuran. Jika variable-variable tersebut semakin kecil, maka pembangunan sudah semakin membaik.

Sritua Arief pada tahun 1980, mensarikan beberapa komponen indikator pembanungan yang terkait denga pembangunan ekonomi. Yaitu 1. Naiknya pendapatan riil perkapita, 2. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan, 3. Menurunnya kemiskinan absolut. 4. Naiknya harga diri sebagai manusia. 5. Naiknya harga diri sebagai bangsa. 6. Bertambahnya kebebasan dari kebodohan dan ketidak tahuan rakyat dan pemerintah. 7. Berkurangnya ketergantungan pada pihak asing, 8. Berkurannya ketergantungan rakyat pada pemerinatah. 9. Bertambah luasnya partisipasi sosial.

Indikator pembangunan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang penting, namun bukan lah satu-satunya variable. Oleh karena itu jika pertumbuhan yang rendah bukan menjadi masalah bsar jika kesempatan kerja bisa meluas, pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi, kemampuanj eknomi masyarakat semakin merata dan pendidikan semakin baik. Hal ini bisa saja terjadi kalau investasi lebih banyak dilakukan oleh ekonomi rakyat yang walaupun niali investasinya kecil nambu bisa menambah output masyarakat dan memberikan kesempatak kerja yang luar. Kebijakan-kebijakan sebelumnya akhirnya juga menyalahkan investasi yang terbata, yang lebih menekankan pembangunan pada unit-unit skala besar melalui investasi konglomerat atau modal asing. Memang selama itu unit-unit usaha demikianlah yang memberikan kontribusi pada laju

pertumbuhan ekonomi padamasa lalu. Disamping itu dukungan pinjaman luar negeri yang besar juga telah mengatrol pertumbuhan ekonomi yang ternyata sangat rapuh.

Dengan lebih memperluas indikator pembangunan ekonomi, maka seharusnya arah kebijakan pembangunan bisa dirubah, yakni dengan lebih berorientasikan pada pemecahan masalah ekonomi yang mendesak, seperti pengangguran, kemiskinan yang jumlahnya sekitar 40 juta jiwa. Untuk memecahkan masalah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan ekonomi rakyat yang tidak harus melalui investasi yang besar-besaran. Tanpa didasari sebetulnya selama beberapa tahun terakhir ini ekonomi rakyat terus berkembang walaupun dunia usaha besar dan pemerintah terus mengeluhkan berbagai kesulitan,, termasuk merosotnya investasi. Dukungan pada perkembangan ekonomi nasional ini akan semakin besar jika ada suatu perubahan mendsar dalam kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan dan memihak ekonomi rakyat tersebut.Diakui atau tidak aktivitas ekonomi rakyat, baik di sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah lainnya, masih akan berperan besar dalam mendukung perekonomian.

Ekonomi politik kenaikan harga BBM

Kenaikan harga BBM pada dsarnya sulit dihindarkan, jika di dalam negeri terjadi defisit anggaran, karena memang tidak ada langkah jangka pendek yang bisa meningkatkan penerimaan untuk menutupi pengeluaran yang meningkat sebagai akibat beberapa asumsi dalam APBN yang tidak terpenuhi, terutama terkait dengan sumsi nilai tukar rupiah dipatok terlalu tinggi. Dengan kenaikan harga BBM ini , defisit anggaran bisa ditekan. Namun harga yang harus dibayar banyak hal seperti berbagai aksi masa, terutama para pekerja transportasi umum, kenaikan harga-harga umum, kesengsaranan puluhan jiwamasyarakat miskin, dan merosotnya aktivitas produksi sebagai akibat naiknya harga input berupa BBM yang hampir digunakan pada setiap aktivitas produksi.

Namun dalam beberapa kasus sering muncul DPR begitu kooperatif seakan memaksakan diri untuk menaikkan harga BBM. Sebab dengan kenaikan BBM diharapkan pemerintah yang baru nanti tidak akan terbebani dengan kebijakan yang memberatkan publik. Maka lebih baik kebijakan kenaikan BBM ini dinaikan terlebih dahulu yaitu pada saat pemerintah belum berganti. Dengan demikian resiko kemarahan publik akan ditanggung pemerintah sekarang. Dengan naiknya BBM sebelum Sidang umum akan mengurangi sedikit beban tugas menteri-menteri ekonomi di pemerintahan yang baru. Memang bisa saja kebijakan ini tidak dilakukan, namun akibatnya adalah beban defisit anggara pemerintah akan semakin membengkak.

Namun demikian kebijakan kenaikan harga BBM ini pun belum tentu aman. Sebab dapat tejadi penolakan masyarakat yang dapat memicu kejatuhan suatu pemerintahan seperti terjadi pada jaman Orde Baru

Dengan situasi pemerintah dan pengelolaan perminyakan seperti sekarang ini, maka kenaikan BBM merupakan sesuatu yang selalu rutin. Ini dikarenakan harga minyak kita dikaitkan dengan harga minya di pasar dunia karena bahan baku untuk penyulingan minya kita dibeli dari luar negeri. Dengan harga minyak dunia yang tinggi, dan nilai tukar rupiah yang terus merosot, maka otomatis biaya produksi menjadi meningkat. Jika harga jual tetap maka subsidi atas BBM akan meningkat. Akibatnya untuk menekan subsidi tersebut harga jual dalam negeri pun harus ditingkatkan. Akibatnya pula tidak mengherankan apabila saat harga minyak dunia meningkat, yang berarti pemerintah beruntung karena penerimaan minyak pemerintah naik, harga BBM dalam negeri juga segera naik. Masyarakat justru ketar-ketir disaat pemerintah bergembira karena kenaikan

penerimaannya .Biaya produksi BBM yang tinggi juga tidak bisa lepas dari inefisiensi yang ada di Pertamina itu sendiri.